



# Pedagang Waswas Omzet Amblas

## ■ Besok Diterapkan Malioboro Semipedestrian

### RESAH

- Para pedagang yang tergabung dalam PPMAY resah omzet akan menurun saat Malioboro dijadikan semipedestrian selama dua pekan mendatang.
- Selama uji coba, setiap Selasa Wage, omzet mereka rata-rata turun hingga 30%.
- Dengan dua pekan pembatasan ini, desmasikan omzet pedagang akan turun lebih banyak.
- Penolakan terhadap rencana ini juga datang dari pedagang yang jumlahnya bisa mencapai 300 unit.

- Nantinya kendaraan bermotor (pada pengecualian) tidak boleh masuk Malioboro.
- Kendaraan umum bermotor yang boleh masuk hanyalah bus Trans Jogja.
- Uji coba menjadi Malioboro bebas rammer dilaksanakan 3-15 November.
- Pada Selasa (3/11), Malioboro bebas kendaraan akan diberlakukan 11.00-22.00 WIB.

*Sementara beberapa keluarga dari pedagang ada yang harus rutin ke dokter. Kalau penghasilan mereka terganggu bagaimana?*

**Karyanto**  
Ketua PPMAY

- Sedangkan pada 4-15 November, Malioboro bebas kendaraan diterapkan mulai pukul 06.00-22.00 WIB. Rekayasa jalan satu arah di sekitar Malioboro akan diterapkan selama 24 jam.

**YOGYA, TRIBUN** - Kendaraan bermotor (beberapa pengecualian) akan dilarang melintas di Malioboro selama dua pekan, mulai Selasa (3/11) besok. Artinya, pengunjung kawasan termasyhur di DIY ini harus dipertimbangkan menggunakan kendaraan nonbermotor atau bus Trans Jogja jika ingin melintasi Malioboro.

Merespons rencana ini, Perkumpulan Pengusaha Malioboro-Ahmad Yani (PPMAY) menyatakan keberatannya. Ketua PPMAY, Karyanto mengungkapkan, keberatan tersebut berdasar pada kebijakan penerapan semipedestrian membuat omzet bisnis di kawasan tersebut turun selalu turun.

Jika uji coba dilakukan selama dua pekan sejak 3-15 November mendatang, Karyanto khawatir tingkat kerugiannya akan lebih tinggi. "Setiap uji coba semipedestrian selalu membikin omzet kami turun hingga 30 persen," katanya kepada *Tribun Jogja*, Minggu

## Pedagang Waswas

● Sambungan Hal 1

(1/11).

Karyanto menyatakan, rencana penerapan semipederstrian ini perlu dipertimbangkan secara matang oleh Pemda DIY. Sebab, para pedagang harus menjalankan kewajiban seperti membayar pajak, menggaji karyawan, dan lain-lain. Dikhawatirkan ketika omzet turun setelah uji coba dua pekan ini maka mereka akan kesulitan membayar karyawan.

Imbasnya tentu saja keberlangsungan kehidupan orang banyak. "Kami kan harus bayar pajak, karyawan, listrik. Sementara beberapa keluarga dari pedagang ada yang harus rutin ke dokter. Kalau penghasilan mereka terganggu bagaimana?" tegas Karyanto.

Karyanto berkeluh kesah, jika selama ini dia taat membayar pajak. Sedangkan saat akan penerapan rencana Malioboro semipederstrian ini, dia merasa pemerintah seperti tidak memikirkan dampak ke depannya. "Apakah pemerintah memikirkan kesusahan pemilik toko? Padahal kami sudah taat bayar pajak, listrik, air sebagai kewajiban kami kepada pemerintah," urainya.

Selain itu, Karyanto turut berharap agar pemerintah segera membangun gedung parkir tambahan agar mobilitas pemilik toko tidak terganggu. Sebab menurut-

nya, penggunaan parkir di sirip-sirip kawasan Malioboro membuat tempat tersebut menjadi seperti terabaikan. "Apakah pemerintah pernah memikirkan kesusahan pemilik toko, mobilitas sulit, karena banyak aktivitas parkir di sirip Malioboro," imbuhnya.

Karyanto turut menyuarakan lantaran kebijakan yang direncanakan Pemda DIY tersebut tidak melibatkan PPMAY, agar dapat menyampaikan usulannya. "Kami bisa memberi pendapat yang terbaik. Karena pertimbangannya selama ini sudah banyak toko yang tidak kuat menahan beban, karena ongkos (omzet) semakin turun," pungkasnya.

### Dua opsi

Penyedia jasa becak motor (betor) meminta dua opsi kepada Pemda DIY terkait rencana pemberlakuan semipederstrian di Malioboro. Para pebetor merasa penghasilannya dipersempit selama dua pekan penerapan rencana itu.

Mereka menganggap apabila kendaraan bermotor dilarang masuk kawasan Malioboro, maka penyedia jasa betor juga ikut terdampak. Padahal setiap harinya para penyedia jasa betor mengandalkan pendapatannya dari wisatawan di Malioboro.

Ketua Paguyuban Becak Motor Yogyakarta (PBMY), Parmin, menyampaikan keberatan terkait rencana Giratori atau rekayasa lalu lintas di Malioboro dan sekitarnya tersebut. Sejak awal dirinya menolak adanya rencana rekayasa semipederstrian di kawasan pusat wisata belanja Kota Yogyakarta tersebut.

"Lah wong setiap Selasa Wage saja itu kami cukup berat. Apalagi ini dua minggu. Pendapatan kami itu untuk dimakan sehari. Tolong dipertimbangkan itu. Kalau Malioboro dua minggu ditutup, kami makan apa?" katanya kepada *Tribun Jogja*, kemarin.

Untuk itu, lanjut Parmin, dirinya meminta agar Pemda DIY bersedia memberikan subsidi kepada para pebetor di Malioboro selama dua pekan berlangsungnya pemberlakuan semipederstrian tersebut. Karena dirinya mengklaim selain dari Malioboro, para penyedia jasa betor sulit mendapatkan penumpang, lantaran setiap titik objek wisata sudah ada kelompoknya masing-masing.

"Ya, kami minta subsidi selama dua minggu itu. Karena sangat sulit kalau Malioboro ditutup. Atau kalau tidak bersedia, ya, kami cari tempat pangkalan yang bisa menghasilkan pendapatan," tegasnya.

### Soal perut

Permintaan subsidi tersebut, menurut Parmin bisa

berupa uang atau yang lainnya. Ia tidak keberatan apabila pemberian subsidi sesuai dengan pendapatan minimal per harinya. Sementara saat disinggung mengenai pendapatan per hari saat beroperasi, Parmin mengatakan minimal mendapat Rp100 ribu. "Tapi kan ini masih pandemi, sangat sulit untuk mendapat angka segitu. Hanya beberapa hari ini saja pas ada libur panjang," urainya.

Sedangkan menurut dia, penyedia jasa betor di Malioboro saat ini sekitar 300 unit. Jika ditotal secara keseluruhan di DIY ada 1.700 unit betor. "Di Malioboro yang paling kena dampaknya kalau ada penutupan. Itu ada sekitar 300 betor," terang Parmin.

Secara tegas Parmin juga menyampaikan jika pendapatannya selama ini justru turut terbantu dari penyedia atau pusat oleh-oleh, baik kuliner, maupun yang lainnya. Jika Malioboro ditutup, ia khawatir tidak ada lagi wisatawan yang bisa diantar ke pusat oleh-oleh karena betor juga dilarang untuk masuk.

Rencananya Senin (2/11) hari ini dirinya bersama anggota PBMY akan mendatangi DPRD DIY untuk menyampaikan keberatannya terkait rencana kebijakan tersebut. "Kami ajak anak istri supaya pak dewan dan pemerintah paham ini bukan soal aturan, tapi juga soal perut," pungkasnya. (hda)

| Instansi          | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|-------------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. UPT. Malioboro | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 01 September 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005